



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA KAMPUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 11 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sedang mewabah, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Fakfak Nomor 11 Tahun 2020 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Kepala Distrik adalah penyelenggara Pemerintahan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik dalam Kabupaten Fakfak yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak.
14. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.
15. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Dana Kampung, selanjutnya disingkat DK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
21. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
22. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa kampung.
23. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

25. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
26. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
31. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
32. Tipologi Kampung adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Kampung maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Kampung).
33. Kampung Mandiri adalah Kampung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kampung untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
34. Kampung Maju adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

35. Kampung Berkembang adalah Kampung potensial menjadi Kampung Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
36. Kampung Tertinggal adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
37. Kampung Sangat Tertinggal adalah Kampung yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
38. Produk Unggulan Kampung dan produk unggulan kawasan perkampungan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Kampung atau di wilayah antar Kampung yang dikelola melalui kerjasama antar Kampung.
39. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
40. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
41. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
42. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
43. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Distrik, Kabupaten dan Provinsi.

44. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
45. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
46. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
47. Badan Usaha Milik Kampung atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
48. Lumbung Ekonomi Kampung adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Kampung secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Kampung.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Kampung meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Kampung kepada keluarga miskin di Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Kampung merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020 NOMOR 022



PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2020

BAB I

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Kampung ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Kampung yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Kampung adalah mewujudkan masyarakat Kampung sebagai subyek pembangunan dan Kampung sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Kampung.

Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Kampung merupakan Subyek Hukum. Posisi Kampung sebagai subyek hukum menjadikan Kampung memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Kampung sebagai bagian pendapatan Kampung merupakan milik Kampung, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Kampung merupakan bagian dari kewenangan Kampung. Undang-Undang Desa mengamanatkan Kampung berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Kampung ini menjadikan Kampung sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Kampung itu sendiri. Kendatipun demikian, Kampung dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Kampung memilih Kepala Kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM). Kepala Kampung berkewajiban untuk memimpin Kampung sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Kampung. BAPERKAM menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Kampung dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Kampung harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Kampung, BAPERKAM dan masyarakat Kampung melalui musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh BAPERKAM. Hasil musyawarah Kampung wajib dipedomani oleh Kepala Kampung dalam merumuskan berbagai kebijakan Kampung, termasuk kebijakan pembangunan Kampung. Tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Kampung mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Kampung secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Kampung dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Kampung.

Pembangunan Kampung mengarah pada terwujudnya kemandirian Kampung dikarenakan kegiatan pembangunan Kampung wajib diswakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Kampung serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Kampung mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Kampung maka Kampung berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Kampung yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Kampung. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Kampung secara langsung kepada Kampung adalah agar Kampung berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Penggunaan Dana Kampung dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Kampung sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Kampung wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten dan Kampung dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Kampung dengan berdasarkan tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Kampung, dan Peningkatan pendapatan asli Kampung maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Kampung pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Kampung Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Kampung sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Kampung pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Kampung yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Kampung;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Kampung.
7. Berbasis sumber daya Kampung dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Kampung.

D. Prioritas Penggunaan Dana Kampung Berdasarkan Kewenangan Kampung

Dana Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan Kampung, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

Tata cara penetapan kewenangan Kampung dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Kampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung dengan melibatkan Kampung;
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Kampung, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kampung dengan menetapkan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung ini menjadikan Kampung berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Kampung. Karenanya, kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Kampung harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

Idealnya, setiap Kampung sudah memiliki Peraturan Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sehingga Kampung kesulitan menetapkan peraturan Kampung tentang kewenangan Kampung.

Oleh sebab itu, untuk membantu Kampung memprioritaskan penggunaan Dana Kampung sesuai kewenangan Kampung, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Kampung di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Kampung.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;

- 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Kampung; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Kampung-Kampung di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Kampung antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Kampung;
 - 8) jalan Kampung antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Kampung;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Kampung; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Kampung;
 - 2) website Kampung;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Kampung;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Kampung;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;

- 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Kampung bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Kampung yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Kampung;
 - 9) bangunan perpustakaan Kampung;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Kampung;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kampung;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Kampung;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) mesin penetas telur;
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra.);
 - 14) embung Kampung;

- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
 - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;
 - 23) gudang Kampung (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) mesin *packaging* kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) pasar Kampung;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *pergola*;
 - 3) *gazebo*;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);

- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) *tracking* wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 23) *internet corner*; dan
 - 24) sarana dan prasarana Kampung Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
 - 5) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
 - 6) kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
 - 7) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 8) pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampung;
 - 9) P3K untuk bencana;
 - 10) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kampung; dan
 - 11) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Kampung Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Kampung dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Kampung dan produk hotikultura;
 - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) penguatan Pos penyuluhan Kampung (Posluhkam);
 - 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;

- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Kampung;
 - 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 22) peningkatan peran mitra Kampung dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Kampung;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Kampung;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Kampung;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;

- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Kampung tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Kampung;
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Kampung;
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Pengelolaan sarana prasarana Kampung berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Kampung, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. pengelolaan transportasi Kampung, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Kampung;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Kampung;
 - 2) website Kampung;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan

- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:
 - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Kampung;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan

- 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. pendirian dan pengembangan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama, antara lain:
 - 1) pendirian BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - d. pengembangan usaha BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Kampung;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Kampung;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekkam);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perkampungan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4)

- 5) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 6) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 7) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMKampung, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMKampung, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Kampung;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain.
 - 3) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 4) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 5) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 6) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Kampung (SIK);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung, rumah Kampung sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Kampung;

- 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Kampung;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Kampung;
 - 2) penyusunan profil Kampung/data Kampung;
 - 3) penyusunan peta aset Kampung;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Kampung rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Kampung;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Kampung sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Kampung;
 - 4) rebug *stunting* di Kampung;
 - 5) rebug anak Kampung khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Kampung tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Kampung;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Kampung berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Kampung yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Kampung yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung, antara lain:
 - 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kampung perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Kampung; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung yang diselenggarakan di Kampung, antara lain:
 - 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Kampung, aset Kampung, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
 - 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Kampung sesuai kondisi Kampung;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Kampung Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung, antara lain:
 - 1) pemantauan berbasis komunitas;

- 2) audit berbasis komunitas;
- 3) pengembangan unit pengaduan di Kampung;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Kampung untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Kampung;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Kampung;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Kampung untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Kampung; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung.

Kampung mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Kampung. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Kampung maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, maka Kampung dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Kampung sesuai dengan daftar kewenangan Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, maka Kampung dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Kampung dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BAPERKAM menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kampung hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung tentang daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung sesuai dengan daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kampung; dan
 - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Kampung yang akan dibiayai Dana Kampung setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APB Kampung.

H. Prioritas Penggunaan Dana Kampung berdasarkan Tipologi Kampung dan Tingkat Perkembangan Kemajuan Kampung.

1. Bidang Pembangunan Kampung:
 - a) Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan.
 - b) Kampung berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
 - d) Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
 - 1) pembentukan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan

pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan.

- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMKampung dan/atau BUMKampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
 - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Kampung secara berkelanjutan.
- b. Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
- 1) penguatan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMKampung dan/atau BUMKampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Kampung; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan.
- c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
 - 2) perluasan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMKampung dan/atau BUMKampung, pengelolaan

produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung;

- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Kampung; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan.
- d. Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Tertinggal, Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kampung penyandang disabilitas;

I. Alokasi Afirmasi.

Kampung yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Kampung;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Kampung yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Kampung yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Kampung menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Prosedur penetapan penggunaan Dana Kampung mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Kampung. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMKampung, RPKKampung dan APBKampung disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Kampung. Prioritas penggunaan Dana Kampung adalah bagian dari penyusunan RPKKampung dan APBKampung.

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Kampung–RPJMKampung:

Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung merupakan bagian dari hal-hal strategis di Kampung, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Kampung tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMKam;
- b. Evaluasi RPKKam tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya; dan
- d. Pembentukan Tim Penyusun RPKKampung.

Hasil kesepakatan musyawarah Kampung tentang prioritas penggunaan Dana Kampung harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Kampung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Kampung:

- a. Kepala Kampung mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Kampung berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Kampung. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Kampung wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Kampung;
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung khususnya terkait penggunaan Dana Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Kampung di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Kampung;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Kampung yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Kampung berdasarkan perkembangan Kampung yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RPKKampung sebelum mulai menyusun draft rancangan RPKKampung wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Kampung tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Kampung;
 - 2) pagu indikatif Dana Kampung;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Kampung yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN;
 - 4) data tipologi Kampung berdasarkan perkembangan Kampung yang dihitung berdasar IDM; dan
 - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Kampung.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dalam Penyusunan Rancangan RKP Kampung:

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Kampung dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Kampung, Kepala Kampung dengan dibantu Tim Penyusun RKP Kampung menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Kampung. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam tahapan penyusunan RKP Kampung adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan:

Penggunaan Dana Kampung harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kampung dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung. Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Kampung. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Kampung dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Kampung, selanjutnya penggunaan Dana Kampung difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Kampung. Penggunaan Dana Kampung difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kampung, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Kampung memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung masyarakat Kampung mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Kampung, membuka lapangan kerja bagi warga Kampung dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Kampung utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Kampung yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kampung; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat:

Penggunaan Dana Kampung dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Kampung dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Kampung. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Kampung didukung masyarakat Kampung, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Kampung lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Kampung;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Kampung dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Kampung bersama masyarakat Kampung lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Kampung; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Kampung lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Kampung:

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibiayai Dana Kampung diarahkan untuk menjadikan Dana Kampung tetap berputar di Kampung. Cara memutar Dana Kampung secara berkelanjutan antara lain Dana Kampung diswakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Kampung.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang direncanakan untuk diswakelola Kampung dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Kampung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Kampung.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan:

Tujuan pembangunan Kampung akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Kampung dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Kampung diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Kampung:

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Kampung yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Kampung bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Kampung, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan:

Dana Kampung digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Masyarakat Kampung harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Kampung. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Kampung.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Kampung:

Dalam hal Kampung bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung untuk pembangunan kantor Kampung bagi Kampung yang belum memiliki kantor Kepala Kampung dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Kampung di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Kampung sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Kampung.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana:

Kampung Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung, Kepala Kampung dengan dibantu Tim Penyusun RKP Kampung melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Kampung. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Kampung.

Kepala Kampung berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Kampung rancangan RKP Kampung yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Kampung. Rancangan RKP Kampung, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Kampung ini. Rancangan RKP Kampung selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Kampung yang diselenggarakan Kepala Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Kampung menjadi pedoman bagi Kepala Kampung dan BAPERKAM dalam menyusun Peraturan Kampung tentang RKP Kampung. Kepala Kampung dan BAPERKAM wajib mempedomani peraturan Kampung tentang RKP Kampung ketika menyusun APBKampung.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Kampung:

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Kampung dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Kampung untuk masing-masing Kampung. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Kampung-Kampung peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung.

Kepala Kampung merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Kampung dengan berpedoman kepada RKP Kampung. Dana Kampung dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Kampung. Kepala Kampung dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Kampung yang sudah ditetapkan dalam RKP Kampung.

Rencana penggunaan Dana Kampung masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung. Kepala Kampung berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Kampung perihal Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung. Sosialisasi rancangan APB Kampung dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati.

Masyarakat Kampung, melalui BAPERKAM, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Kampung apabila rancangan penggunaan Dana Kampung berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang RKP Kampung. Dalam hal Kepala Kampung berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Kampung yang sudah ditetapkan dalam RKP Kampung, maka BAPERKAM berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Kampung. Dengan demikian, rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Kampung.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Kampung:

a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung termasuk rencana penggunaan Dana Kampung. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Kampung memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Kampung berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
- 2) termasuk urusan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- 4) prioritas penggunaan Dana Kampung yang tercantum dalam Rancangan APB Kampung direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung dinyatakan rencana penggunaan Dana Kampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Kampung. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Kampung;
- 2) kepala Kampung menyampaikan kepada masyarakat Kampung perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Kampung;

- 3) masyarakat Kampung melalui BAPERKAM berhak mengajukan keberatan kepada kepala Kampung apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Kampung sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BAPERKAM dapat menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati tanggapan Kampung terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Kampung;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kampung dinyatakan Kampung menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Kampung, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Kampung; dan
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kampung dinyatakan Kampung menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Kampung, maka kepala Kampung mengajukan keberatan kepada Bupati melalui kepala distrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik.

BAB III

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Kampung di bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Kampung dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Kampung;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Kampung;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

Apabila Kampung tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Kampung di ruang publik, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Kampung kepada Bupati:

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Kampung mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung. Kampung berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Bupati.

Laporan prioritas penggunaan Dana Kampung dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perdes tentang kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
- b. Perdes tentang RKPKampung;
- c. Perdes tentang APBKampung;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung

2. Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur:

Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Gubernur oleh Bupati u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Kampung wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.

3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Bupati.

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus:

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Kampung, masyarakat Kampung berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
4. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (Facebook);
 - c. e-complaint.kemendesa.go.id; dan
 - d. website http : www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Kampung. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kampung dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung. Pendampingan Kampung dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Kampung pada level Kampung secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Kampung;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Kampung;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Kampung; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Kampung.

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS



SISTEMATIKA

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI.

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Kampung. Padat karya tunai di Kampung merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat karya tunai di Kampung adalah:
 - a. diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur;
 - 3) setengah penganggur; dan
 - b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Kampung;
 - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Kampung sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perKampungan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat padat karya tunai:
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Kampung; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
3. Dampak:
 - a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Kampung terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perKampungan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perKampungan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perKampungan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi

4. Sifat kegiatan padat karya tunai:
 - a. swakelola:
 - 1) kegiatan padat karya tunai di Kampung dilaksanakan melalui mekanisme swakelola; dan
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Kampung dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa;
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Kampung yang berasal dari Kampung setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung; dan
 - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Kampung yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
 - a. rehabilitasi irigasi Kampung;
 - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Kampung;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan jalan rabat beton;
 - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 - f. pembangunan embung Kampung;
 - g. penanaman hutan Kampung;
 - h. penghijauan lereng pegunungan; dan
 - i. pembasmian hama tikus.

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*).

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; dan
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;

- c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
 3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi ((jamban keluarga);
 4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
 5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
 7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
 8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
 9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Kampung;
 10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
 11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; dan
 16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI).

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara:

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan; dan
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Kampung untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak;
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat);
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun;
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting;
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan;
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan–2 tahun dan 3–6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Kampung dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:

- a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan–2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - b. makanan tambahan untuk anak 3–6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
 - a. sumber air bersih;
 - b. pembuangan limbah yang benar; dan
 - c. sanitasi.
 14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
 15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
 16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
 17. obat-obatan ringan P3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI KAMPUNG.

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perKampungan. Oleh karena itu, masyarakat Kampung harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Kampung perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Kampung antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Kampung (KKPK)
 - KKPK yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPK akan bertugas untuk melakukan:
 - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik; dan
 - c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar diKampung.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. Ibu rumah tangga;
 - b. Anak-anak, pemuda, dll;
 - c. Pelaku usaha pangan:
 - 1) industri rumah tangga pangan;
 - 2) kelompok usaha bersama;
 - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
 - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Kampung.
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Kampung, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*).
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK.

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Kampung. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Kampung yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Kampung merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Kampung.

Dana Kampung dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Kampung yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Kampung;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Kampung, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7–18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; dan
 - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Kampung yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi;
- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan;
- 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) dana pendidikan anak;
 - b) dana ibadah; dan
 - c) dana kebutuhan khusus;
- 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas;
- 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong:
 - a) Materi Pelatihan:
 - (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
 - (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;
 - (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 - (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
 - (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
 - (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
 - (7) Pelatihan kader Kampung dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
 - b) Bentuk Penggunaan Dana Kampung:
 - (1) Pelatihan kader Kampung untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - (2) Pelatihan perempuan kader Kampung untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
 - (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
 - (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Kampung untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Kampung.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama:

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Kampung harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan:

Meningkatkan pemahaman warga Kampung umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran:

- 1) Warga Kampung;
- 2) Pemuka Agama; dan
- 3) Orangtua.

c. Bentuk Penggunaan Dana Kampung:

- 1) Pelatihan kader Kampung untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
- 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
- 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin:

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Kampung harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya;
- 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga;
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik; dan
- 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi:

- 1) Psikologi perkembangan & kematangan personal;
- 2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah;
- 3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini;
- 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik; dan
- 5) Merencanakan perkawinan.

- d. Bentuk Penggunaan Dana Kampung:
- 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja;
 - 2) Pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*);
 - 3) Pelatihan kader Kampung pendamping remaja (pendampingan sebaya); dan
 - 4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya.
4. Pendidikan Keluarga Sakinah:
- Bagi warga Kampung yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Kampung memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Kampung untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.
- a. Tujuan Umum:
- Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.
- b. Tujuan Khusus:
- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah;
 - 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga;
 - 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga;
 - 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan;
 - 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama; dan
 - 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Materi:
- 1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat;
 - 2) Membangun pondasi keluarga sakinah;
 - 3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah;
 - 4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah;
 - 5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - 6) Memenuhi kebutuhan keluarga.
- d. Bentuk Penggunaan Dana Kampung:
- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
 - 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
 - 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Kampung dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perKampungan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Kampung tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Kampung dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;

2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Kampung Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA.

Kemiskinan di Kampung salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Kampung dalam mengelola potensi dan aset Kampung sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Kampung. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Kampung dalam penggunaan Dana Kampung dengan sasaran antara lain:

1. warga Kampung pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Kampung dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Kampung.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung, Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Kampung yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Kampung (prukam) dan produk unggulan kawasan perkampungan (prukakam). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain :

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Kampung; d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Kampung; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Kampung satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

Dana Kampung juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Kampung yang akan bekerja di luar negeri, antara lain :

- a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan bahasa asing;
- c. perpustakaan Kampung yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN KAMPUNG INKLUSI.

Kampung Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Kampung bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Kampung penyandang disabilitas.

Kampung Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Kampung yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Kampung Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Kampung Inklusi adalah kondisi masyarakat Kampung yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Kampung Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Kampung dapat digunakan oleh warga Kampung dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Kampung Inklusi, antara lain:

- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Kampung, taman Kampung;
- b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Kampung, balai Kampung, taman Kampung dan sebagainya.
- c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
 - 1) alat bantu dengar;
 - 2) alat bantu baca;
 - 3) alat peraga;
 - 4) tongkat;
 - 5) kursi roda; dan
 - 6) kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KAMPUNG/KAWASAN PERKAMPUNGAN.

Dana Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan Kampung harus mampu dikelola oleh Kampung secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Kampung dapat menghasilkan pendapatan asli Kampung. Pengelolaan Dana Kampung secara berkelanjutan antara lain Dana Kampung diswakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Kampung.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Kampung/kawasan perKampungan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Kampung/kawasan perKampungan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk;
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Kampung, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor;
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kampung/kawasan perKampungan;
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup;
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan;
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Kampung/kawasan perKampungan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor; dan
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Kampung menerbitkan Perkam tentang Produk unggulan Kampung sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Kampung.

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Kampung (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan (Prukakam). Berikut contoh-contoh kegiatan Prukam dan Prukakam yang dapat dibiayai Dana Kampung, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan:

Masyarakat Kampung di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Kampung-Kampung yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Kampung dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK). BKAK dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Kampung (MAK) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Kampung-Kampung menggunakan Dana Kampung untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAK bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten. Kampung juga dapat menggunakan Dana Kampung untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAK membentuk BUMKampung Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan.

BUMKampung Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan:

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Kampung dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Kampung dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik:

Kampung yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Kampung berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Kampung yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Kampung adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Kampung bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMKampung, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi:

Kampung-Kampung yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Kampung-Kampung yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Kampung melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Kampung untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Kampung.

BKAK meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Kampung tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Kampung. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Kampung yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Kampung dapat menggunakan Dana Kampung untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Kampung yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMKampung Bersama yang dibentuk oleh BKAK. Modal awal BUMKampung Bersama berasal dari Dana Kampung yang disertakan oleh Kampung-Kampung yang menjalin kerjasama antar Kampung. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMKampung Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perKampungan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMKAMPUNG / BUMKAMPUNG BERSAMA.

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Kampung berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Kampung (BUMKampung) dan/atau BUMKampung Bersama. Perbedaan antara BUMKampung dengan BUMKampung Bersama adalah BUMKampung dibentuk dan dibiayai oleh satu Kampung, sedangkan BUMKampung Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK) dan dibiayai oleh Kampung-Kampung yang terikat kerjasama antar Kampung.

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai Kampung dalam menyertakan modal di BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Kampung untuk modal BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama. Contoh penggunaan Dana Kampung untuk modal BUMKampung adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Kampung dapat menggunakan Dana Kampung untuk modal BUMKampung, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Kampung dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Kampung untuk pengembangan usaha BUMKampung yaitu usaha BUMKam Mart. BUMKampung Mart adalah minimarket modern di Kampung yang dikelola dengan sistem komputerisasi;
2. Sebuah Kampung yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Kampung untuk modal usaha BUMKampung yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMKampung yang berasal dari Dana Kampung digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Kampung (PAKam). PAKam ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung seperti pemberian kartu sehat oleh Kampung, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Kampung; dan

3. Kampung-Kampung yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Kampung-Kampung yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK) sebagai badan pengelola kerjasama antar Kampung untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAK ini membentuk BUMKampung Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Kampung yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMKampung Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMKampung Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR KAMPUNG.

Pasar Kampung adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Kampung dan dikelola serta dikembangkan oleh Kampung melalui BUMKampung dengan menggunakan Dana Kampung. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Kampung bagi masyarakat Kampung meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Kampung yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Kampung sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Kampung dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kampung;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Kampung untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Kampung adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Kampung dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Kampung untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
4. menumbuhkan Kampung mandiri karena warga Kampung akan membeli produk-produk dari Kampungnya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA KAMPUNG.

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*.

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Kampung. Pembuatan gambar Kampungin dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Kampung Teknik Infrastruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Kampung dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Kampung Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Kampung. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Kampung serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Kampung memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

3. Standar Teknis:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung Kampung diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung Kampung diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Kampung harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Kampung yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi; dan
- e. ukuran Embung Kampung disesuaikan dengan kemampuan Kampung dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N. PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA.

Kampung-Kampung di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Kampung.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Kampung sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Kampung, sekaligus sebagai aset Kampung dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Kampung.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Kampung untuk membiayai pembangunan Kampung Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Kampung;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Kampung;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Kampung setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAK) melalui BUMKAM.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Kampung Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Kampung dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMKampung antara lain:

- a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
- b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
- c. kios cenderamata;
- d. Ruang ganti dan/atau toilet;
- e. *Pergola*;
- f. *Gazebo*;
- g. Lampu Taman;
- h. Pagar Pembatas;
- i. panggung kesenian/pertunjukan;
- j. Pusat jajanan kuliner;
- k. Tempat Ibadah;
- l. Menara Pandang (*viewing deck*);
- m. Gapura identitas;
- n. wahana permainan anak;
- o. wahana permainan outbound;
- p. taman rekreasi;
- q. tempat penjualan tiket;
- r. angkutan wisata;
- s. tracking wisata mangrove;
- t. peralatan wisata snorkeling dan diving;

- u. papan interpretasi;
- v. sarana dan prasarana kebersihan;
- w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- x. internet corner;
- y. Pelatihan pemandu wisata;
- z. Interpretasi wisata;
- aa. Pelatihan pengelolaan Kampung Wisata;
- bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/ Pokdarwis;
- cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

Salah satu unsur penggunaan Dana Kampung yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Kampung. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Kampung dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Kampung untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro:

Masalah yang dihadapi Kampung-Kampung di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Kampung-Kampung yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMKampung. Warga Kampung membeli listrik Kampung yang dikelola oleh BUMKampung. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Kampung memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Kampung memperoleh pendapatan asli Kampung dari usaha pengelolaan listrik Kampung.

2. Kehutanan Sosial:

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Kampung dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Kampung yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Kampung untuk kesejahteraan Kampung;
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat;
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat; dan
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Kampung dan/atau warga masyarakat Kampung di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Kampung dan/atau masyarakat Kampung dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Kampung digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Kampung.

3. Pengolahan Air Minum:

Bagi Kampung yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Kampung untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kampung tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen:

Sumberdaya alam Kampung sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Kampung bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin:

Produktifitas masyarakat Kampung perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycraft*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestrai dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Kampung biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Kampung, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kampung untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Kampung.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI.

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Kampung.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Kampung. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Kampung merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Kampung seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Kampung dikarenakan sebagian besar masyarakat Kampung bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Kampung adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Kampung. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Kampung untuk mitigasi perubahan iklim skala Kampung perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kampung. Sebagai contoh untuk Kampung yang rawan kebakaran hutan, dana Kampung dapat digunakan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas pemerintah Kampung, BAPERKAM dan masyarakat Kampung agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Kampung adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Kampung untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Kampung.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Kampung perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Kampung dengan Kampung lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kampung dalam jangka panjang, penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+:
Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+/*Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Kampung meliputi:

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Kampung yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Kampung (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Kampung secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 - 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 - 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Kampung yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
 - 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 - 4) pengadaan alat angkut sampah;
 - 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 - 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
 - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Kampung tentang program REDD+;
 - 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 - 3) patroli kawasan hutan Kampung;
 - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Kampung untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
 - 5) peningkatan kapasitas masyarakat Kampung untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Kampung;
 - 6) peningkatan kapasitas masyarakat Kampung untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

- 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Kampung; dan
 - 8) pengembangan kapasitas masyarakat Kampung untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim:
Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Kampung meliputi antara lain:
- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Kampung, dengan kegiatan antara lain:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
 - 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 - 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi–adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim:
Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kampung dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Kampung meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 - 1) pembuatan/perbaiki parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

9. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM.

1. Bencana Alam:

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Kampung belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Kampung mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Kampung dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Kampung yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Kampung untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;

- 2) pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Kampung yang rawan tanah longsor;
 - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - 9) pelatihan masyarakat Kampung untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
- 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
 - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

2. Bencana Nonalam:

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Kampung dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Kampung Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Kampung Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Kampung

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM)

Anggota : a. Perangkat Kampung;

b. Anggota BAPERKAM;

c. Kepala Dusun atau yang setara;

d. Ketua RT;

e. Pendamping Lokal Kampung;

f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

g. Pendamping Kampung Sehat;

h. Pendamping lainnya yang berdomisili di Kampung;

i. Bidan Kampung;

j. Tokoh Agama;

k. Tokoh Masyarakat;

l. Tokoh Adat;

m. Karang Taruna;

n. PKK; dan

o. Kader Penggerak Masyarakat Kampung (KPMK).

Mitra : a. Babinkamtibmas;

b. Babinsa; dan

c. Pendamping Kampung.

- b. Tugas Relawan Kampung Lawan COVID-19:
- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kampung yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;
 - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
 - 7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Kampung;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga kampung setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga kampung yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Kampung (24 Jam); dan
 - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19):
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) penyiapan ruang isolasi di Kampung;
 - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung (BLT-Dana Kampung):
 - a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - b. Mekanisme Pendataan:
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Kampung Lawan COVID-19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT dan Kampung;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung; dan
 - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi kampung, oleh Kepala Kampung dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Kampung dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Distrik.
 - c. Metode dan Mekanisme Penyaluran:
 - 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Kampung mengikuti rumus:
 - a) Kampung penerima Dana Kampung kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Kampung maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Kampung.
 - b) Kampung penerima Dana Kampung Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Kampung maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Kampung.
 - c) Kampung penerima Dana Kampung lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Kampung maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Kampung.
 - d) Khusus Kampung yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
 - 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kampung dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
 - d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Kampung:
 - 1) masa penyaluran BLT-Dana Kampung 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) besaran BLT-Dana Kampung per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
 - e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM);
 - 2) Kepala Distrik; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten.

- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Kampung adalah Kepala Kampung.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM.

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Kampung bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana Nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemic seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam dengan, ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBKam:
 - a. Keadaan Bencana:
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri; dan
 - 2) Pelatihan keterampilan pasca bencana.
 - b. Keadaan Darurat:
 - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana;
 - 2) Pelayanan kesehatan;
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian; dan
 - 4) Menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit, dan lain-lain.
 - c. Keadaan Mendesak:
 - 1) Memberikan pertolongan pertama:
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Kampung dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP);
 - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*):
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 - 3) Penyediaan dapur umum:
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
 - 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat;
 - 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya;
 - 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya;
 - 7) Pengamanan Lokasi:
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 - 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Kampung Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKampung) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPKam:

1. Kampung yang akan menggunakan Dana Kampung untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Kampung Tahun 2020;
2. Perubahan RKP Kampung dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Kampung 2020;
3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refocusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4. Refocusing kegiatan Kampung dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung;
5. Perubahan RKP Kampung Tahun 2020 disusun oleh Kepala Kampung dibantu oleh Tim Penyusun RKP Kampung dengan berdasarkan berita acara musyawarah Kampung tentang refocusing kegiatan Kampung;
6. Rancangan perubahan RKP Kampung yang disusun oleh Kepala Kampung dan tim penyusun perubahan RKP Kampung dibahas dan disepakati oleh Kepala Kampung, BAPERKAM dan unsur masyarakat Kampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (MusrenbangKampung); dan
7. Hasil kesepakatan musrenbangKampung tentang Rancangan Perubahan RKP Kampung menjadi dasar bagi Kepala Kampung dan BAPERKAM untuk menetapkan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APBKampung Tahun 2020:

1. Bagi Kampung yang sudah menetapkan APBKampung Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPKampung Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBKampung tahun 2020;
2. Kepala Kampung dan BAPERKAM melakukan perubahan APBKampung Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Kampung tentang RKP Kampung 2020 Perubahan;
3. Kepala Kampung mengajukan rancangan perubahan TPBKampung tahun 2020 untuk direview oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Kampung; dan
4. Dalam hal rancangan perubahan APBKampung Tahun 2020 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Kampung dan BAPERKAM menetapkan Peraturan Kampung tentang APBKampung tahun 2020 Perubahan.

S. SISTEM INFORMASI KAMPUNG.

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Kampung di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kampung (SIK) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Kampung sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBKampung tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Kampung. Perencanaan pembangunan Kampung yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Kampung yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Kampung dengan pembangunan kawasan perKampung dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Kampung.

Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SIK. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SIK sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SIK berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Kampung lebih tepat sasaran;
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Kampung dalam menyusun rencana kerja pembangunan Kampung.

SIK yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Kampung;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Kampung;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Kampung melalui SIK dapat dimanfaatkan oleh Kampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Kampung yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN KAMPUNG.

Keterbukaan informasi pembangunan Kampung dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Kampung.

Sosialisasi pembangunan Kampung merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Kampung maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung.

Informasi pembangunan Kampung disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Kampung melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Kampung, koran Kampung;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Kampung, televisi; dan
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Kampung, dan penggiat seni budaya.

Kampung dapat menggunakan Dana Kampung untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Kampung dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Kampung untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Kampung.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI KAMPUNG.

Salah satu kata kunci dalam definisi Kampung adalah bahwa Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Kampung dipandang sebagai pelaku aktif di Kampung yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Kampung yang dikelola oleh Kampung secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Kampung sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Kampung yang ikut serta mengelola Dana Kampung mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Kampung (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Kampung mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Kampung yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Kampung secara langsung kepada Kampung, dan pengelolaan Dana Kampung secara mandiri oleh Kampung pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Kampung pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Kampung diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Kampung. Oleh sebab itu, Kampung harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Kampung, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Kampung yang dibiayai dari Dana Kampung.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Kampung yang dapat dibiayai dengan Dana Kampung meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Kampung:

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Kampung adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Kampung:

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Kampung. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS



